

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pada era pasca-Perang Dingin, menjadi saksi meningkatnya konflik di Afrika, yang mendorong pengerahan Misi Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNPKM) untuk mengatasi permusuhan, melindungi warga sipil, memfasilitasi rekonsiliasi nasional, dan mendukung negara-negara yang dilanda perang di Afrika (Kparekouti & Mallya, 2023). Republik Afrika Tengah telah mengalami beberapa konflik sejak tahun 1990an. Pada tahun 2013, sebuah gerakan pemberontak yang dikenal sebagai Seleka ("koalisi") menggulingkan Presiden Bozizé, yang merebut kekuasaan dengan kekerasan Pertama dekade sebelumnya. Periode keruntuhan negara yang kacau pun terjadi. Pembentukan operasi penjaga perdamaian PBB pada tahun 2014 dan pemilihan umum berikutnya menyebabkan pelantikan Presiden Touadéra, seorang ahli matematika dan mantan perdana menteri di bawah pemerintahan Bozizé, pada tahun 2016. Langkah-langkah ini membantu menstabilkan pemerintah pusat di Bangui. Di tempat lain di negara ini, faksi-faksi eks Seleka dan anti-Balaka terus melakukan serangan terhadap warga sipil dan Pertama sama lain (Arief, 2021).

Sejak Maret 2013, Republik Afrika berada dalam kekacauan yang ditandai dengan konflik sektarian yang disertai kekerasan. Memburuknya situasi keamanan dan runtuhnya negara telah menimbulkan kekhawatiran bahwa krisis ini akan meluas hingga melintasi perbatasan negara, sehingga mengancam stabilitas regional. Pada akhir tahun 2013, hampir setahun setelah konflik pecah, komunitas internasional mengerahkan misi penjaga perdamaian PBB (Nathalia Dukhan, 2016). Krisis kemanusiaan di Republik Afrika Tengah terus memburuk. Akibat kekerasan terhadap warga sipil dan ketidakamanan di wilayah luar pusat kota, beberapa juta orang semakin rentan dan penghidupan mereka memprihatinkan (HNO, 2023).

Pada tahun 2023, 3,4 juta orang- 56 persen dari populasi - membutuhkan bantuan dan perlindungan kemanusiaan, meningkat 10 persen dibandingkan tahun 2022. Jumlah ini mencakup 2 juta orang yang mempunyai kebutuhan yang sangat

mendesak sehingga kesejahteraan fisik dan mental mereka berada pada kondisi yang buruk. Konflik di Afrika tengah masih terjadi hingga saat ini, bagi Afrika kata-kata tentang keterbelakangan, kemiskinan masih melekat hingga saat ini meskipun ada upaya stabilisasi internasional. Walaupun intensitas bentrokan antara pihak-pihak yang berkonflik telah berkurang, kekerasan terhadap warga sipil belum dapat mengimbangi dan penghidupan terus memburuk, termasuk akibat dari pengungsian paksa. Selain itu, tekanan dalam rumah tangga akibat kerawanan pangan, serta penerapan mekanisme penanggulangan yang negatif telah menyebabkan peningkatan kekerasan berbasis gender (GBV), yang berdampak pada ribuan perempuan dan anak perempuan. Dengan tidak bersekolah, anak-anak berisiko lebih besar mengalami berbagai bentuk eksploitasi termasuk bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, dan eksploitasi seksual. Laki-laki dan anak laki-laki lebih mungkin direkrut paksa oleh kelompok bersenjata, sementara perempuan dan anak perempuan berisiko mengalami pernikahan paksa atau pernikahan dini, dan kehamilan dini (HNO, 2023).

Sejak pendiriannya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan dukungan institusional dari organisasi telah melakukan upaya untuk melindungi dan meningkatkan perdamaian dan keamanan di dunia. Sebagai organisasi antar pemerintah internasional, PBB berfungsi sebagai kerangka kerja untuk penyelesaian masalah Republik Afrika Tengah termasuk menyelesaikan konflik antar negara dan memelihara perdamaian dan keamanan pasca konflik dan pasca perang (Sarjoon, 2019). Pemeliharaan perdamaian bukan hanya salah satu kegiatan yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tetapi dalam banyak hal juga merupakan kegiatan PBB. Penjagaan perdamaian dimulai sebagai alat manajemen konflik, yang bertujuan untuk menjauhkan negara-negara yang bertikai. Dengan berakhirnya Perang Dingin, PBB dan negara-negara anggotanya mengadaptasi alat ini untuk tujuan penyelesaian konflik, dengan tujuan membantu negara-negara mengatasi permasalahan internal mereka (De Coning, 2019).

Menjunjung perdamaian dan keamanan internasional antar negara adalah salah satu tujuan paling penting dari PBB. Sebagai mekanisme untuk menyelesaikan semua krisis internasional antar negara, Dewan Keamanan telah merancang operasi pemeliharaan perdamaian. Karena negara-negara yang terlibat

konflik meminta bantuan dalam menyelesaikan permasalahan dalam negeri maka PBB mempunyai peran yang signifikan dalam menyelesaikan semua permasalahan internasional. Untuk mengatasi masalah ini dengan cepat, PBB mengirimkan personel bantuan militer ke negara-negara yang dilanda konflik (Santoso et al., 2023). Peran serta PBB dalam menangani permasalahan dalam sebuah negara bermula atas permohonan dari negara yang memiliki permasalahan tersebut. Adanya ketidakmampuan pada negara-negara yang mengharapkan bantuan dari PBB sehingga menyebabkan negara tersebut meminta bantuan pasukan militer guna penyelesaian konflik yang ada (Santoso et al., 2023). Dalam beberapa dekade terakhir, tentara dari puluhan negara semakin terlibat dalam operasi penjaga perdamaian multinasional yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi regional di beberapa negara atau wilayah (Goulart, 2023).

*United Nations Peacekeeping Operation (UNPKO)* dikerahkan berdasarkan mandat dari Dewan Keamanan PBB. Selama bertahun-tahun, cakupan tugas yang diberikan pada operasi perdamaian PBB telah diperluas sebagai respon terhadap perubahan pola konflik dan upaya terbaik untuk mengatasi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa membantu negara-negara yang dilanda konflik menciptakan kondisi perdamaian yang abadi. Pemeliharaan perdamaian telah terbukti menjadi salah satu peran PBB untuk membantu negara tuan rumah dari konflik menuju perdamaian. Meskipun praktik pemeliharaan perdamaian PBB telah berkembang selama enam dekade terakhir, ada tiga prinsip dasar yang berfungsi sebagai operasi pemeliharaan perdamaian PBB sebagai alat untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional: (a) Persetujuan Para Pihak; (b) Ketidakberpihakan Operasi penjaga perdamaian PBB; (c) Tidak Menggunakan Kekerasan Kecuali Untuk Membela Diri Dan Mempertahankan Mandat (United Nations Peacekeeping, n.d.-b).

Lingkungan di mana operasi penjaga perdamaian PBB berada dikerahkan sering ditandai dengan kehadiran milisi, geng kriminal, dan pihak-pihak lain yang mungkin berupaya merusak proses perdamaian atau menimbulkan ancaman terhadap penduduk sipil. Dalam situasi seperti itu, Dewan Keamanan telah memberikan mandat yang “kuat” kepada operasi penjaga perdamaian PBB yang

memberi wewenang kepada mereka untuk “menggunakan semua Republik Afrika Tengah yang diperlukan” untuk mencegah upaya kekerasan. Dengan Republik Afrika Tengah proaktif menggunakan kekuatan untuk mempertahankan mandat mereka, hal ini dapat dilakukan Operasi penjaga perdamaian PBB telah berhasil memperbaiki keadaan situasi keamanan dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk jangka panjang pembangunan perdamaian di negara-negara di mana mereka ditempatkan (United Nations Peacekeeping, n.d.-c).

Misi penjaga perdamaian pertama di Republik Afrika Tengah didirikan oleh African Union pada bulan Desember 2013 Misi penjaga perdamaian pertama di Republik Afrika Tengah didirikan oleh *African Union* pada bulan Desember 2013 (“*Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine*”, *MISCA*). Pertama tahun kemudian, sebagai tanggapan dari komunitas internasional (Valloni et al., 2020). Resolusi Dewan Keamanan PBB 2149 (2014) membentuk *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission In The Central Africa Republic (MINUSCA)* yang dikerahkan ke Republik Afrika Tengah pada tahun 2014 untuk melindungi warga sipil dan membantu menstabilkan negara dengan mendukung pemerintah Republik Afrika Tengah dalam memajukan proses perdamaian politik. Hampir Pertama dekade kemudian, krisis yang terjadi saat ini telah mengubah lingkungan politik dan ancaman di tempat *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission In The Central Africa Republic (MINUSCA)* beroperasi, sehingga berdampak pada kemampuan misi tersebut untuk melaksanakan mandatnya untuk melindungi warga sipil (Giuliano, 2021).

*United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission In The Central Africa Republic (MINUSCA)* diberi mandat untuk melindungi warga sipil, membantu proses perdamaian, melindungi pengiriman bantuan, mendukung perluasan kewenangan negara, dan, dalam kondisi tertentu, "menangkap dan menahan untuk menjaga hukum dasar dan ketertiban serta melawan impunitas," dan tugas lainnya (Arief, 2021). Konflik di Republik Afrika Tengah mengakibatkan kekerasan setiap hari, pelanggaran hak asasi manusia yang parah, dan pengungsian paksa terhadap hampir separuh penduduk negara tersebut, yang bergantung pada bantuan kemanusiaan. Menanggapi krisis keamanan, kemanusiaan, hak asasi manusia, dan politik di Republik Afrika Tengah, Dewan Keamanan PBB

mengizinkan pengerahan *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission In The Central Africa Republic (MINUSCA)* pada 10 April 2014 (Kparekouti & Mallya, 2023). Mandat *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission In The Central Africa Republic (MINUSCA)* adalah untuk melindungi warga sipil, mendukung proses transisi, memfasilitasi bantuan kemanusiaan, memajukan dan melindungi hak asasi manusia, mendukung keadilan dan supremasi hukum, dan terlibat dalam proses perlucutan senjata, demobilisasi, reintegrasi, dan repatriasi. Misi ini beroperasi berdasarkan Bab VII Piagam PBB, dengan wewenang untuk mengambil semua Republik Afrika Tengah yang diperlukan untuk memenuhi mandatnya (Kparekouti & Mallya, 2023).

Konflik yang terjadi mengakibatkan krisis kemanusiaan di Republik Afrika Tengah terus memburuk. Pada misi perdamaian *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission In The Central Africa Republic (MINUSCA)* dihadapkan dengan berbagai krisis kemanusiaan yang meliputi konflik antara kelompok bersenjata, kekerasan antara agama, kelaparan, dan masalah kesehatan yang menyebar seperti pandemi HIV/AIDS dan malaria. Kekerasan berbasis gender (SGBV) didefinisikan sebagai berbagai bentuk kekerasan “terhadap penyakit seseorang dan didasarkan pada norma gender dan hubungan kekuasaan yang tidak setara”. Kejahatan semacam ini tersebar luas di negara-negara yang dilanda konflik, dimana terdapat perempuan dan anak-anak terkena dampak Republik Afrika Tengah tidak proporsional dan menderita segala jenis kekerasan (UNHCR n.d.). Perlindungan perempuan dan anak-anak merupakan salah satu tujuan *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission In The Central Africa Republic (MINUSCA)* sejak didirikan. Mandatnya juga mencakup topik-topik seperti penggabungan personel perempuan ke dalam misi dan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Pada tahun 2017, Resolusi PBB 1172 menegaskan kembali komitmen untuk mengatasi permasalahan seksual eksploitasi dan upaya telah dilakukan di *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission In The Central Africa Republic (MINUSCA)* untuk mengatasi situasi ini (Valloni et al., 2020).

Ketika Perang Dingin berakhir, konteks strategis untuk pemeliharaan perdamaian PBB di Republik Afrika Tengah Dewan keamanan mulai bekerja lebih

aktif untuk mempromosikan resolusi damai regional konflik. Perubahan pola konflik ini juga diikuti dengan perubahan konsep keamanan. Sekarang, konsep keamanan menekankan keamanan negara dan berfokus pada keamanan manusia. Berdasarkan hal tersebut, misi PKO PBB kini bersifat multidimensi; hal ini tidak hanya mencakup menjaga perdamaian dan keamanan tetapi juga memfasilitasi proses politik, melindungi warga sipil, mendukung penyelenggaraan pemilu, melindungi dan memajukan hak asasi manusia, dan membantu memulihkan supremasi hukum. Di sisi lain, perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi sasaran tindakan sewenang-wenang dan diskriminatif di wilayah konflik (Salimi & Dwiyantri (2022).

Di dalam faktanya, perempuan bisa menjadi agen perdamaian yang aktif dalam konflik bersenjata. Melalui resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 (UNSCR1325) Deklarasi Komitmen Bersama Aksi untuk Penjaga Perdamaian (A4P), PBB menyerukan perluasan peran dan kontribusi perempuan dalam operasinya, termasuk perempuan berseragam. penjaga perdamaian. Dalam konteks ini, mendorong partisipasi perempuan, baik dalam pemeliharaan perdamaian maupun dalam masyarakat di tempat mengabdikan (United Nations Peacekeeping, n.d.-e). Perempuan dinilai lebih peka terhadap situasi lingkungan dan budaya setempat sehingga meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap keberadaan penjaga perdamaian perempuan; Keberadaan penjaga perdamaian perempuan memberikan rasa aman dan nyaman terutama bagi anak-anak dan perempuan yang seringkali menjadi korban kekerasan seksual dalam suatu konflik; Penjaga perdamaian perempuan juga memainkan peran sebagai *early peace-builders & role model* bagi para wanita lokal dalam mendorong aktivitas-aktivitas pembinaan perdamaian, termasuk yang berkaitan dengan aspek keamanan seperti proses gencatan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi, serta negosiasi (KEMLU, 2019).

Perempuan ditempatkan di semua bidang polisi, militer dan sipil telah memberikan dampak positif pada lingkungan penjaga perdamaian, termasuk dalam mendukung peran perempuan dalam membangun perdamaian dan melindungi hak-hak perempuan. Di semua bidang pemeliharaan perdamaian, penjaga perdamaian perempuan telah membuktikan bahwa mereka dapat melakukan peran yang sama,

dengan standar yang sama dan dalam kondisi sulit yang sama, seperti rekan laki-laki mereka (United Nations Peacekeeping, n.d.-e).

Indonesia sebagai negara yang mempunyai politik luar negeri yang bebas dan aktif, telah memberikan kontribusi terhadap pengiriman pasukan di wilayah konflik. Hal ini juga didukung oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dengan menugaskan personelnya mengemban berbagai misi sejak tahun 1989. Personel pasukan penjaga perdamaian, yang terbagi menjadi Petugas Polisi Perorangan (IPO) dan Pertamaam Polisi Terbentuk (FPU). Dalam menjalankan tugasnya, IPO mendapat tunjangan dari PerPertamaan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dikelola Republik Afrika Tengahmandiri oleh masing-masing individu untuk akomodasi, konsumsi, dan kebutuhan sehari-hari. Sedangkan FPU menyediakan perlengkapan perorangan disediakan oleh Mabes POLRI, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Divisi Hubungan Internasional. Pada tahun 2019, POLRI untuk pertama kalinya menugaskan FPU RI ke PBB dalam misi United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central Africa Republic *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission In The Central Africa Republic (MINUSCA)* ) (Putri, 2021).

Indonesia pertama kali mengirimkan Peacekeeping Operations merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan negara lain atau pihak lain terhadap suatu negara yang sedang mengalami konflik. Kegiatan ini dilakukan di bawah pengawasan Dewan Keamanan PBB melalui operasi militer yang dilakukan dengan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian. Operasi militer yang dilakukan juga mempunyai batasan-batasan tertentu, dimana yang melakukan intervensi hanya untuk mendamaikan keadaan dari konflik yang disebabkan oleh pihak yang bertikai, dan mengurangi aktivitas kontak senjata kecuali sebagai alat pelindung diri. Sejak tahun 1989, Indonesia telah mengirimkan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengambil bagian sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB, baik dalam misi menjaga perdamaian di negara-negara konflik maupun pasca-konflik (Faudina & Nurhadi, 2022).

Keterlibatan Indonesia dalam MPP PBB telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amanat tersebut kemudian dijelaskan dalam Politik Luar Negeri Pemerintah Indonesia yang bebas aktif pada

Pasal 3 UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, dan berdasarkan hasil Resolusi Dewan Keamanan PBB no 2499 (2019) tentang Misi Perdamaian di Republik Afrika Tengah. Dalam Misi PBB yang dilaksanakan Indonesia pada tahun 2019, Indonesia berperan aktif dalam mengirimkan personel Polri ke MINUSCA 2019. Keputusan menugaskan personel Polri dalam misi penjaga perdamaian PBB, selain memiliki tujuan lain, yakni memperkuat kerja sama multilateral untuk menyelesaikan konflik dengan negara lain, dan menunjukkan komitmen negara Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia yang menyatakan Penugasan Anggota Polri di luar Susunan Organisasi Polri adalah pengalihan tugas dan jabatan Anggota Polri ke tempat tugasnya (Faudina & Nurhadi, 2022).

Peran polisi Sebagai Pasukan Perdamaian Indonesia di Republik Afrika Tengah Hal ini berdasarkan mandat yang disampaikan Dewan Keamanan PBB kepada negara-negara anggotanya. Keputusan tersebut diambil oleh Sekretariat Jenderal PBB pada tahun 2019 yaitu António Guterres dengan bergabungnya Indonesia di PBB, maka Indonesia harus mengikuti prosedur yang dibuat oleh Dewan Keamanan. Pengiriman Kepolisian Negara Republik Indonesia ke MINUSCA dijelaskan dalam Pasal 41 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia secara aktif membantu tugas memelihara Perdamaian Dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa". Dengan begitu, setiap tahunnya Indonesia mengirimkan Polri pilihannya dalam bentuk satuan berisi 140 personel. Satuan polisi ini disebut *Formed Police Unit (FPU)* MINUSCA (Faudina & Nurhadi, 2022). Peran Polisi Sebagai Pasukan Perdamaian Indonesia di Republik Afrika Tengah Pengerahan Kepolisian sebagai personel misi penjaga perdamaian PBB telah dilakukan sejak bergabung dengan ABRI atau sekarang dikenal dengan TNI. Untuk pertama kalinya Polri terlibat dalam misi penjaga perdamaian PBB pada tahun 1989 di Namibia. Kegiatan ini terus mendapat perhatian pemerintah, hingga akhirnya keluarlah visi Presiden Republik Indonesia yang menginginkan tercapainya 4000 Pasukan Penjaga Perdamaian Indonesia sehingga mampu menjadikan Indonesia menempati posisi 10 besar dalam pengiriman Pasukan Militer. Polri telah mengirimkan personelnnya ketika Indonesia dinyatakan sebagai

negara anggota PBB dan ikut berkontribusi dalam operasi perdamaian di PBB. (Faudina & Nurhadi, 2022)

Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di dunia. Bangsa Indonesia harus terlibat dalam upaya untuk mewujudkan perdamaian dunia karena perdamaian dunia merupakan cita-cita kemerdekaan dan tujuan politik luar negeri Indonesia. Indonesia dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan perdamaian dunia dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang memiliki peran aktif dalam perdamaian dan keamanan global (Santoso et al., 2023). Peran Indonesia dalam perdamaian dunia diwujudkan melalui partisipasi dan kontribusi aktif dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB atau MPP PBB. Organisasi ini merupakan bentuk organisasi yang memiliki sifat universal bagi seluruh dunia. Sebagai Organisasi Internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki mempunyai hak dan kewajiban yang kemudian tercantum dalam konvensi-konvensi internasional yang dijadikan sebagai dasar aturannya. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia juga diwujudkan melalui partisipasi dan kontribusi aktif melalui Misi Garuda atau Misi Kontingen Garuda. Kontingen Garuda adalah pasukan penjaga perdamaian yang anggotanya diambil dari militer Indonesia yang bertugas di bawah naungan PBB. Pasukan ini terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan POLRI yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain (Santoso et al., 2023).

Peneliti menemukan pentingnya kontribusi Polisi Wanita Indonesia terhadap misi pemeliharaan perdamaian PBB, dengan pembahasan khusus kontribusi Polisi Wanita Indonesia dalam Misi *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission In The Central Africa Republic (MINUSCA)* memainkan peran besar dalam pengembangan perdamaian dengan melibatkan lebih banyak wanita dalam tujuan menjaga perdamaian, efektivitas yang lebih besar akan dicapai dalam menjaga perdamaian. Selain itu, pasukan penjaga perdamaian wanita memiliki akses yang lebih baik ke masyarakat. Melibatkan sejumlah besar wanita dalam operasi perdamaian akan mempromosikan hak asasi manusia, melindungi warga sipil, dan menginspirasi perempuan untuk menjadi pemain kunci dalam proses perdamaian.

Perempuan memiliki potensi untuk menghasilkan solusi yang lebih inklusif. Karena pendekatan yang inklusif akan melibatkan partisipasi aktif dan representasi yang adil dari perempuan serta kelompok-kelompok lain yang terlibat dalam upaya perdamaian dan keamanan, tanpa memandang jenis kelamin, latar belakang, atau identitas lainnya. Pendekatan inklusif ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua suara didengar dan dipertimbangkan dalam upaya menangani konflik dan memperjuangkan perdamaian.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Penelitian ini yaitu: diarahkan penulis menentukan pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana keterlibatan Polisi Wanita Indonesia dalam misi *peacekeeping* di Republik Afrika Tengah?”

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Penelitian ini berfokus kepada kontribusi penting Polisi Wanita Indonesia dalam perdamaian dan keamanan melalui misi *Formed Police Unit (FPU) II United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission In The Central Africa Republic (MINUSCA)* tahun 2020-2021. Periode waktu tersebut dipilih berdasarkan salah Pertama operasi misi yang harus tetap berjalan dalam melakukan mandatnya di wilayah konflik pada saat pandemi COVID-19 berlangsung.

## **1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dipenuhi berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan adalah:

1. Mengetahui krisis kemanusiaan yang terjadi di Republik Afrika Tengah.
2. Mengkaji keterlibatan Polisi Wanita Melalui *Formed Police Unit (FPU) Indonesia Dalam United Nations Multidimensional In The Central Integrated Stabilization African Republic (MINUSCA)*.
3. Menelaah kendala dalam keterlibatan Polisi Wanita Melalui *Formed Police Unit (FPU) Indonesia dalam misi United Nations Multidimensional In The Central Integrated Stabilization African Republic (MINUSCA)*.

#### **1.4.2. Kegunaan Penelitian**

Dalam sebuah penelitian terdapat beberapa manfaat yang bias diperoleh. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini merupakan salah Pertama tanggung jawab dan kewajiban dalam menempuh program studi S-1, yaitu dengan mmebuat suatu karya ilmiah sebagai salah Pertama prasyarat kelulusan program studi Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pasundan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa hubungan internasional dan juga pembaca lainnya dalam memahami lebih lanjut tentang bagaimana peran Polisi Wanita yang tergabung dalam *Formed Police Unit (FPU) Indonesia United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission In The Central Africa Republic (MINUSCA)*.
3. Penelitian ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat luas dalam melihat atau memahami peran perempuan sebagai pasukan perdamaian. Melalui penelitian ini, peneliti berharap agar peran Polisi Wanita dalam melaksanakan tugas misi pemeliharaan perdamaian dunia dapat diapresiasi.